

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

Amiruddin Mustam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: amirudistainpare@yahoo.co.id e

Abstract:

Political Islamic education during the old order is directed towards the renewal and development of the institution in accordance with the demands of the times, but this attempt failed. In addition because Indonesia is still in a state of transition, as well as the ideological force that affects the political situation and government policies, including the political influence of Islamic education. Future Governments long pull of the three forces are in the nationalist, secular-communist, and the power of Islam. New Order government's determination to implement Pancasila and UUD1945 pure and consistent and clear debris mental Communists in Indonesia, making religion a crutch force in building a national culture and preserve the values of Pancasila and the 1945 Constitution is why so devotion to God Almighty One is a national educational goals in order to develop the nation and the national culture. Political future of Islamic education must remain grounded in the Quran and Sunnah, not in Western modernism, nor the orthodoxy of the past. Political Islamic education geared to empower people, build bargaining power of the people, and the building of Islamic civilization.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Indonesia, Kemerdekaan.

I. PENDAHULUAN

Kemerdekaan, terjadi ketika kerajaan-kerajaan di Indonesia berjaya di tanah air, awal munculnya kerajaan di tanah air diinspirasi dari pertumbuhan agama Hindu dan Budha, semangat spiritualisme masyarakat mendorong kegairahan untuk mendirikan pusat-pusat pendidikan atau padepokan yang mengajarkan sendi-sendi kehidupan dan membangun sebuah komunitas masyarakat yang adil, berbudaya dan beradab. Dari padepokan-padepokan melahirkan kesatria-kesatria calon pemimpin bangsa (raja). Pemimpin-pemimpin yang lahir dari kalangan kesatria tampil dari godokan kawah candradimuka dengan pendidikan berperilaku adil, cerdas, arif dan bijaksana, sehingga mampu melahirkan sebuah bangsa yang besar.

Begitu juga masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yang diwarnai

oleh pertumbuhan Islam di Indonesia. Pondok-pondok pesantren menjadi pusat kawah candradimuka, tempat untuk mendidik dan membina manusia yang taat beragama, berbudaya, dan beradab.

Pendidikan merupakan investasi manusi yang amat besar dalam memajukan suatu bangsa, termasuk didalamnya memajukan peradaban manusia. Tujuan pendidikan itu merupakan tujuan dari negara itu sendiri. Pendidikan yang rendah dan tidak berkualitas akan terus mengundang para penjajah, baik penjajahan secara fisik maupun non fisik, seperti penjajahan intelektual, pemikiran, ekonomi, sosial, politik dan agama. Hal ini senada dengan ungkapan "kebodohan bukanlah karena penjajahan tetapi kebodohanlah yang mengundang penjajah."¹

Mengamati perjalanan sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sungguh menarik dan

memiliki proses yang amat panjang. Belanda yang menduduki Indonesia selama 3 1/2 abad dan Jepang selama 3 1/2 tahun meninggalkan kesengsaraan, mental dan kondisi psikologis yang lemah. Dengan misi gold, glory dan gospels mereka mempengaruhi pemikiran dan ideologi dengan doktrin-doktrin Barat. Akan tetapi kita sepatutnya bangga dengan perjuangan para tokoh Muslim pada masa itu yang berupaya sekuat tenaga untuk mengajarkan Islam dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah, Pesantren, Majelis Taklim dan sebagainya. Dari lembaga inilah kemudian lahir tokoh-tokoh Muslim yang berperan besar dalam mewujudkan kemerdekaan dan membela risalah Islam. Materi yang dipelajari menggunakan referensi dari kitab-kitab kuning, selain itu ilmu jiwa, ilmu hitung pun dipelajari. Pada saat itu disamping menuntut ilmu, juga harus berjuang melawan penjajah.²

Pendidikan Islam hingga kini masih berada dalam posisi problematik antara determinisme historis dan realisme praktis. Di satu sisi pendidikan Islam belum sepenuhnya bisa keluar dari idealisasi kejayaan pemikiran dan peradaban Islam pada masa lampau yang hegemonik, sementara di lain sisi, ia juga dipaksa untuk menerima tuntutan masa kini, khususnya yang datang dari Barat, dengan orientasi yang praktis-progresif.³

Kenyataan historis tersebut acap kali menimbulkan dualisme dan polarisasi sistem pendidikan di tengah-tengah masyarakat muslim sehingga agenda transformasi sosial yang digulirkan seakan berfungsi hanya sekedar tambal sulam, karena itu tak mengherankan apabila satu sisi kita masih saja mendapati tampilan sistem pendidikan Islam yang sangat tradisional karena tetap memakai "baju lama" (the old fashion), sementara di sisi lain kita juga mendapati sistem pendidikan Islam yang bercorak materialistik-sekularistik.⁴

Sejalan dengan pendapat di atas Arnol⁵ menyatakan bahwa pendidikan Islam perlu melakukan reposisi dan reaktualisasi ulang dengan membaca

kepentingan Islam dan masyarakat Islam kedepan. Muhaimin⁶ berpendapat, pendidikan Islam yang didasarkan pada aliran-aliran atau paham keislaman, selain hanya akan menghasilkan umat Islam yang berkotak-kotak, juga tidak menguntungkan perkembangan Islam dalam persaingan global. Selanjutnya Feisal⁷ menyatakan pendidikan Islam yang mengadopsi sistem pendidikan barat, disamping melemahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam yaitu, membentuk manusia taqwa, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah, juga tidak akan mungkin mencapai tujuan pendidikan Barat yang bersifat sekuler.

Berdasar uraian pada latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok yang dijadikan objek pembahasan dalam kajian ini adalah bagaimana perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan?. Selanjutnya sistematika dan arah pembahasan dirinci dan dibatasi dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa orde lama
2. Bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa orde baru
3. Bagaimana pendidikan Islam ke depan dalam orde reformasi

II. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara revolusi oleh bangsa Indonesia terus menimbulkan ketegangan antara Indonesia sebagai Negara yang baru merdeka dengan Belanda dan sekutunya yang masih berupaya menguasai Indonesia sebagai Negara jajahan, maka pada bulan Oktober 1945 para ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad fisabilillah terhadap Belanda dan sekutunya, sebagai fatwa kepastian hukum bagi perjuangan umat Islam. Adapun isi fatwa sebagai berikut: (1) Kemerdekaan Indonesia wajib dipertahankan (2) Pemerintah RI adalah satu-satunya pemerintah sah yang wajib dibela

dan diselamatkan (3) Musuh-musuh RI (belanda-sekutu), pasti kan menjajah kembali bangsa Indonesia. Karena itu, kita wajib mengangkat senjata terhadap mereka. (4) Kewajiban-kewajiban tersebut diatas adalah jihad fisabilillah.⁸

Fatwa ulama sebagaimana di atas mengandung makna pengembangan pendidikan agama Islam sebagai berikut: (1) Para ulama dan santri-santri dapat mempraktekan ajaran jihad fisabilillah yang sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian kitab suci Fikih di pondok atau di madrasah. (2) Pertanggung jawaban mempertahankan kemerdekaan tanah air itu menjadi sempurna terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan Yang Mahaesa, di tengah-tengah berkobarnya revolusi fisik.⁹

Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), oleh karena itu dikeluarkan peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta). Adapun pendidikan-pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama. Pendidikan agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah. Pada tahun 1950 ketika kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh wilayah Indonesia, maka rencana pendidikan makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh professor Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian menghasilkan SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951 isinya ialah:

a. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat. Daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat misalnya di Sumatera, pendidikan Agama diberikan mulai kelas 1 SR

dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah yang lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.

- b. Di sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
- c. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya.
- d. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. Pada periode orde lama ini, berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan yaitu:

1. Dari tahun 1945-1950 landasai idiil pendidikan ialah UUD 1945 dan falsafah Pancasila
2. Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di negara bagian Timur dianut suatu sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda
3. Pada tanggal 17 agustus 1950 dengan terbentuknya kembali negara kesatuan RI landasan idiil pendidikan UUD SR
4. Pada tahun 1959 Presiden mendekritkan RI kembali ke UUD 1945 dan menetapkan manifesto politik RI menjadi haluan negara.
5. Pada tahun 1945, sesudah G 30 S/PKI kita kembali lagi melaksanakan pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.¹⁰

Politik pendidikan Islam pada masa orde lama lebih diarahkan pada upaya pembaharuan dan pengembangan lembaga pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman, namun upaya ini gagal. Selain karena Indonesia yang masih dalam keadaan panca-roba, juga karena kekuatan ideologis yang mempengaruhi situasi politik dan kebijakan pemerintah, termasuk mempengaruhi politik pendidikan Islam.

Pemerintah Orde Lama berada dalam tarikan tiga kekuatan yaitu nasionalis, sekuler-komunis, dan kekuatan Islam, sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno menganut paham ideologis nasionalis yang berbasis pada ke-Indonesiaan dan cultural. Dalam posisi seperti ini Presiden terkadang dekat dengan kelompok Islam dan terkadang dekat dengan kelompok sekuler-komunis, menjelang tahun 60 han Soekarno lebih banyak terjebak ke dalam perangkap kaum sekuler komunis sehingga perhatiannya terhadap pendidikan Islam sangat kurang, umat Islam terpinggirkan, bahkan tokoh-tokoh Muslim dipenjarakan, dalam keadaan demikian politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya membendung paham komunis.¹¹

2. Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Orde Baru adalah masa pemerinthan Indonesia kedua pasca kemerdekaan setelah masa pemerintahan Orde Lama yang berakhir pada tahun 1965 yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 yang diperkuat oleh kekuatan ABRI dan gerakan pemuda angkatan 1966. Pemerintah Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali pada UUD 1945, dan melaksanakannya secara murni dan konsekwen. Pola pembangunan Orde Baru adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, dan dikembangkan secara bertahap melalui revelita.

Tekad pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konekwen dan membersihkan sisa-sisa mental Komunis di Indonesia, menjadikan agama sebagai kekuatan penopang dalam membangun budaya bangsa dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Itulah sbabnya sehingga ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tujuan pendidikan nasional dalam ranka pengembangan bangsa dan budaya bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan agama diberikan kepada semua jenis, tingkat, dan jalur sekolah, baik negeri maupun swasta.¹²

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menag, Mendikbud, dan Mendagri) No 03 Tahun 1975 adalah awal masuknya pendidikan agama sebagai sub system dari system pendidikan nasional dengan tujuan¹³ meningkatkan mutu pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya untuk bidang non agama. Di dalam usaha peningkatan komponen pendidikan non agama perlu dicermati agar tidak jatuh dari ekstrem yang satu ke ekstrem yang lainnya. Diperlukan pengelolaan yang baik agar terdapat keseimbangan antara ciri khas pendidikan Islam dengan niat untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai perkembangan zaman.

Posisi SKB tiga Menteri disamping bernilai positif bagi pengembangan kelembagaan dan mobilitas sosial siswa madrasah dan Pesantren, karena status Madrasah dan pesantren disamakan dengan sekolah-sekolah umum yang sederajat, juga dapat bernilai negatif bagi pengembangan ilmu agama siswa Madrasah dan Pesantren yang menjadi karakter awal dari pendirian lembaga pendidikan ini.¹⁴

Perkembangan lebih lanjut pendidikan Islam pada masa Orde Baru dapat dilihat pada UU Sisdiknas nomor 2 Tahun 1989, dalam undang-undang ini pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat (a) pendidikan Pancasila (b) pendidikan agama, dan (c) pendidikan kewarganegaraan, yang berarti bahwa dalam undang-undang ini, menjadikan bidang studi agama sebagai bidang studi wajib bagi setiap jenis dan jenjang sekolah. Selanjutnya angin segar bagi pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Agama Islam di Indonesia kembali dihembuskan pada UU Sisdiknas No 20 tahun 2003, dalam UU ini disamping mengatur system pengembangan pendidikan Islam pasal 30 juga mengatur system pendanaan Madrasah yang disamakan dengan sekolah umum.¹⁵

Selain beberapa potensi pendukung untuk pergerakan dan pengembangan pendidikan Islam dimasa Pemerintahan Orde Baru, juga terdapat beberapa karak-teristik

Pemerintah Orde Baru yang kurang kondusif bagi pengembangan pendidikan Islam. Dalam hubungan ini paling kurang ada lima karakteristik Pemerintah Orde Baru. Pertama, Pemerintah Orde Baru adalah Pemerintahan yang kuat dan dominan. Kedua, Pemerintah Orde Baru adalah Pemerintah yang dipimpin serta didukung oleh kekuatan militer yang bekerjasama dengan teknokrat dan birokrat sipil.¹⁶ Ketiga, Pemerintah Orde Baru melengkapi dirinya dengan aparat keamanan yang represif serta aparat politik-ideologi untuk melestarikan dan mereproduksi kekuasaannya; Keempat Pemerintah Orde Baru sejak awal kebangkitannya mendapatkan dukungan dari kapitalisme internasional; Kelima, jika pada suatu saat Pemerintah Orde Baru mengalami instabilitas, maka hal itu terjadi bukan karena menguatkan posisi politik masyarakat, melainkan lebih disebabkan oleh factor dari dalam tubuh Negara sendiri dan factor dunia internasional.

Karakteristik Pemerintah Orde Baru yang demikian itulah yang pada akhirnya menjadikan masyarakat sangat tumpul dan lemah baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya apalagi dalam bidang-bidang keagamaan. Masyarakat tidak memiliki nilai bargaining yang cukup luas dihadapan pemerintah. Pemerintah seakan dikebiri dalam berbagai aktivitasnya. Pemikiran-pemikiran masyarakat kurang berkembang khususnya yang agak sedikit berbeda dengan ideologi atau paham pemerintah.

Oleh karena itu masyarakat yang hidup pada masa Orde Baru memiliki karakteristik seperti berikut. Pertama masyarakat Orde Baru mempunyai kedudukan yang lemah jika berhadapan dengan kekuasaan Pemerintah; Kedua masyarakat Orde Baru adalah masyarakat yang disartikulasif dan inovulitif¹⁷ Ketiga, masyarakat Orde Baru adalah masyarakat yang mengalami Fragmentasi baik yang bersifat cultural maupun struktural¹⁸ Sebagai akibat dari Pemerintah Orde baru yang mempunyai karakteristik sebagaimana tersebut diatas (kuat, dominant, repressif,

dan militeris) dan masyarakat yang berciri sebaliknya (lemah, tidak berperan, pragmatif ketakutan, disartikulasif dan Involutif), maka hubungan yang terjadi antara Pemerintah dan masyarakat adalah bukan hubungan yang harmonis dalam arti yang sebenarnya. Situasi dan kondisi yang tampak stabil sebenarnya menyimpan bara instabilitas yang tinggi, hubungan yang terjadi bersifat konspiratif, kooptatif, dan dominatif.¹⁹

3. Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Pemerintahan Reformasi adalah pemerintahan yang ditandai oleh semakin berkembangnya wacana demokrasi, namun demikian dari sisi pendidikan masih relative sama dengan era Orde Baru misalnya tentang sentralisasi pendidikan, diantaranya dalam hal kurikulum, ujian, akreditasi, anggaran dan berbagai aturan lainnya.

Era Pemerintahan Reformasi dimulai pada bulan juni 1997, era yang mempengaruhi segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam dunia pendidikan. Era reformasi memberikan ruang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan yang reformatif dan revolusioner.²⁰ Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pasal 11 Undang-Undang No 22 Tahun 1999, menjelaskan bahwa pendidikan salah satu bidang pemerintahan yang didesentralisasikan yang berarti penanganan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Program pembangunan nasional tahun 1999-2004, mengakui bahwa manajemen pendidikan nasional selama ini secara holistik diakui sangat sentralistik, sehingga menutup perkembangan demokratisasi dalam pendidikan. Sentralisasi dalam sistem pendidikan menghasilkan kebijakan seragam yang tidak mampu mewartakan heterogenitas kepentingan setiap daerah, yang kemudian mematikan partisipasi

masyarakat dalam proses pendidikan, serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan.²¹

Keberadaan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, kemudian Proenas 1999-2004, dan arah GBHN 1999-2004, amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yang mengamnatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, sesungguhnya adalah bentuk formulasi arah kebijakan pemerintah reformasi tentang pemerintahan daerah dan sistem pendidikan nasional, juga sebagai upaya mengatasi kelemahan UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah pada era Orde Baru, namun kemudian bukan tanpa masalah.

Undang-Undang No 22 tahun 1999, yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan daerah yang otonom, justru melahirkan penguasa atau raja-raja kecil di daerah kabupaten/kota hingga dinas pendidikan, sekolah-sekolah dan elemen-elemen lainnya.²² Dengan raja-raja kecil tersebut, pendidikan bukan lagi sebagai pengembangan pembangunan pendidikan yang sejalan dengan potensi lokalitas tertentu, tetapi pendidikan lebih dikembangkan untuk mencapai keuntungan-keuntungan ideologis.

Pendidikan Islam yang menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, pasang surut dan masalahnya sangat dipengaruhi oleh kebijakan penguasa dalam era pemerintahan Indonesia. Dari sisi kelembagaan pendidikan Tinggi, dapat dilihat dari awal keberadaan Negara hingga kini di era pemerintahan reformasi sebagai berikut:

1. Pra Kemerdekaan

Pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, dimana Satiman Wirjosandjoyo pernah mengemu-

kakan pentingnya keberadaan lembaga pendidikan tinggi Islam untuk mengangkat harga diri kaum Muslim di Hindia Belanda yang terjajah itu.²³

2. Masa Revolusi Kemerdekaan

Gagasan tersebut akhirnya terwujud pada tanggal 8 Juli 1946, ketika Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri di Jakarta di bawah pimpinan. Abdul Kahar Muzakkir, sebagai realisasi kerja yayasan Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam yang dipimpin oleh Hatta sebagai ketua dan M. Natsir sebagai sekretaris. Ketika masa revolusi, STI ikut Pemerintah Pusat Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta dan pada tanggal 10 April 1946 Gagasan dapat dibuka kembali di kota itu.²⁴

Dalam sidang Panitia Perbaikan STI yang dibentuk pada bulan November 1947 memutuskan pendirian Universitas Islam Indonesia (UII) pada 10 Maret 1948 dengan empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Tanggal 20 Februari 1951, Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) yang berdiri di Surakarta pada 22 Januari 1950 bergabung dengan UII yang berkedudukan di Yogyakarta.²⁵

3. Pasca Revolusi Kemerdekaan

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia secara internasional, Pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang diambil dari Fakultas Agama UII (Yogyakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950. Penetapan PTAIN sebagai perguruan tinggi negeri diresmikan pada tanggal 26 September 1951 dengan jurusan Da'wah (kelak Ushuluddin), Sementara di Jakarta, berdiri Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada 14 Agustus 1957 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957.²⁶

4. Institut Agama Islam Negeri

IAIN "Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah" dengan pusat di Yogyakarta. IAIN ini diresmikan tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama K. H. Wahib Wahab. Sejak tanggal 1 Juli 1965 nama "IAIN Al-Jami'ah" di Yogyakarta

diganti menjadi "IAIN Sunan Kalijaga", nama salah seorang tokoh terkenal penyebar agama Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya selanjutnya, berdirilah cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat. Hal ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963. Hingga akhir abad ke-20, telah ada 14 IAIN, dimana pendirian IAIN terakhir di Sumatera Utara pada tahun 1973 oleh Menteri Agama waktu itu, H. A. Mukti Ali.²⁷

5. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Seperti telah diketahui, dalam perkembangannya telah berdiri cabang-cabang. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), maka PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta menjadi IAIN untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat, untuk mengatasi masalah manajerial IAIN, dilakukan rasionalisasi organisasi. Pada tahun 1997 sebanyak 40 fakultas cabang IAIN dilepas menjadi 36 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang berdiri sendiri, di luar 14 IAIN yang ada, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997.²⁸

6. Universitas Islam Negeri

Dengan berkembangnya fakultas dan jurusan pada IAIN di luar studi keislaman, status "institut" pun harus berubah menjadi "universitas", sehingga menjadi "Universitas Islam Negeri" IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan IAIN pertama yang berubah menjadi UIN, yakni UIN Syarif Hidayatullah.²⁹

Program peningkatan mutu pendidikan yang ditargetkan oleh pemerintah Orde Baru akan mulai berlangsung pada Pelita VII terpaksa gagal, krisis ekonomi yang berlangsung sejak Juli 1997 telah mengubah konstelasi politik maupun ekonomi nasional. Secara politik, Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim yang menamakan diri sebagai "Reformasi Pembangunan" meskipun demikian sebagian besar roh Orde Reformasi masih tetap

berasal dari rezim Orde Baru, namun sedikit tampak perubahan, yaitu adanya kebebasan pers dan multi partai.

Dalam bidang pendidikan kabinet reformasi hanya melanjutkan program wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994 serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis. Tugas jangka pendek Kabinet Reformasi yang paling pokok adalah bagaimana menjaga agar tingkat partisipasi pendidikan masyarakat tetap tinggi dan tidak banyak yang mengalami putus sekolah. Dalam bidang ekonomi, terjadi krisis yang berkepanjangan, beban pemerintah menjadi sangat berat. Sehingga terpaksa harus memangkas program termasuk didalamnya program penyetaraan guru-guru dan mentolerir terjadinya kemunduran penyelesaian program wajib belajar 9 tahun. Sekolah sendiri mengalami masalah berat sehubungan dengan naiknya biaya operasional di suatu pihak dan makin menurunnya jumlah masukan dari siswa, Pembangunan di bidang pendidikan pun mengalami kemunduran. Beberapa hal yang menyebabkan program pembangunan pemerintah dalam sektor pendidikan yang tidak terpenuhi secara maksimal, adalah sebagai berikut:

1. Distribusi pembangunan sektor pendidikan kurang menyentuh lapisan sosial kelas bawah.
2. Kecenderungan yang kuat pada wilayah pembangunan yang bersifat fisik material, sedangkan masalah-masalah kognitif spiritual belum mendapatkan pos yang strategis.
3. Munculnya sektor industri yang membengkak, cukup menjadikan agenda yang serius bagi pendidikan Islam di Indonesia pada masa pembangunan ini.
4. Perubahan-perubahan sosial yang berjalan tidak berurutan secara tertib, bahkan terkadang eksklusif dalam dialektik pembangunan sebagaimana tersebut di atas.³⁰

Semua hal di atas adalah faktor penyebab dari tidak terpenuhinya beberapa maksud pemerintah dalam menjalankan pembangunan dalam sektor pendidikan

agama, khususnya bagi Islam. Semua itu sangat memprihatinkan apalagi jika dibiarkan begitu saja tanpa upaya retrospeksi atas kegagalan tersebut. Yang harus disadari adalah lembaga pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan yang memiliki potensi yang sangat besar bagi jalannya pembagunan di negeri ini terlepas dari berbagai anggapan tentang pendidikan yang ada sekarang, harus diingat bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah banyak melahirkan putra-putri bangsa yang berkualitas.³¹

7. Kekuatan dan kelemahan Pendidikan Islam

a. Kekuatan

Kekuatan pendidikan Islam sebagaimana ditulis H.A.R. Tilaar,³² dalam era reformasi dewasa ini, yang sejalan dengan gelombang demokratisasi di dunia dan di Indonesia, ketika kita bicara mengenai tuntutan hak rakyat termasuk di dalamnya pendidikan, maka demokrasi hanya akan lahir dan berkembang apabila rakyat diberdayakan dan masyarakat ikut serta didalam memberdayakan dirinya. Pesantren adalah system pendidikan dan system kehidupan yang lahir dan dibesarkan oleh masyarakat, yang berarti bahwa pesantren telah lahir dalam suatu masyarakat yang demokratis. Apabila dewasa ini, kita berbicara mengenai inovasi pendidikan nasional untuk melahirkan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atau yang disebut dengan Community Based Management (CBM), maka pesantren merupakan model arabic dari pendidikan tersebut.

b. Kelemahan

Kelemahan pendidikan Islam sebagaimana kata Tilaar,³³ cenderung kepada ortodoksi hal ini dapat dilihat bahwa dalam perjalanan sejarah Pesantren dan Madrasah telah terlempar dari mainstream pendidikan baik pada masa colonial maupun pada pasca kemerdekaan. Pesantren dan Madrasah tumbuh dan berkembang dari bawah dan dengan kemampuan sendiri di tengah-tengah masyarakat yang miskin sudah tentu perkembangannya kedua lembaga

pendidikan ini berada dalam kondisi yang serba sulit.

Keadaan ini pula yang menjadikan Pesantren dan Madrasah bersifat defense mechanism untuk mengungkung diri dari pengaruh luar. Kecurigaan yang berlebihan menyebabkan isolasi dan menolak perubahan. Isolasionism ini juga diperkuat pula oleh sifat keragaman dari Pesantren dan Madrasah, pengelolaan yang berorientasi kepada masyarakat telah melahirkan keanekaragaman pengelolaan yang menyulitkan untuk sebuah standardisasi. Sementara dalam tututan dunia moderen dan globalisasi sandardisasi mutlak diperlukan.

III. KESIMPULAN

Pendidikan Islam hingga kini masih dalam posisi problematik antara determinisme kesejarahan dan ralisme praktis, disatu sisi pendidikan Islam belum sepenuhnya bisa keluar dari idealisasi kejayaan pemikiran dan peradaban islam masa lalu, sementara di sisi lain dipaksa untuk menerima tuntutan masa kini, khususnya yang datang dari Barat, dengan orientasi praktis progresif.

Pergerakan dan pengembangan politik pendidikan Islam di Indonesia, telah mengalami empat masa yaitu masa prakemerdekaan, masa Pemeritahan Orde Lama, masa Pemeritahan Orde Baru, dan masa Pemerintahan Orde Reformasi. Setiap decade pendidikan Islam pergerakan dan pengembangannya selalu sejalan dengan konstelasi politik pada masanya.

Politik pendidikan Islam ke depan harus tetap berpijak pada Quran dan Sunnah, bukan pada modernisme Barat dan bukan pula pada ortodoksi masa lalu. Politik pendidikan Islam diarahkan untuk pemberdayaan umat, membangun kekuatan daya tawar umat, dan membangun peradaban Islam.

Catatan Akhir:

¹<http://www.scribd.com/doc/2911005/> pendidikan-pasca-kemerdekaan

²Ibid

³http://www.gp-ansor.org/resensi_buku/mewujudkan-pendidikan-islam-yang-maju-html

⁴*Ibid*

⁵Jusuf Amir Feisal. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

⁶Muhaimin. 2004. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Surabaya: Pustaka Belajar.

⁷*Op.cit*

⁸<http://www.scribd.com/doc/2911005/pendidikan-pasca-kemerdekaan>

⁹Chalidjah Hasan. 1995. *Kajian Perbandingan Pendidikan*. Surabaya: Al- Ikhlas.

¹⁰*Op-cit*

¹¹Abuddin Nata. 2007. *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

¹²Jusuf Amir Feisal. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

¹³H.A.R. Tilaar. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁴Perbandingan ilmu umum dan ilmu agama pada Madrasah dan Pesantren dalam kurikulum yang dipersamakan adalah 70 persen berbanding 30 persen, Hal ini pernah dikhawatirkan oleh Menag Munawir Sadzali yang kemudian mengembangkan MAPK sebagai solusinya dengan kurikulum yang berbanding sebaliknya 70 persen ilmu agama dan 30 persen ilmu umum, namun kemudian MAPK ini gagal bersaing merebut pasar siswa.

¹⁵<http://pendis.depag.go.id/madrasah/insidex.php?i-367=bd0103>

¹⁶Lihat, A.S. Hikam. 1999. *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. Lihat pula Dewi Portuna Anwar. Format Politik Orde Baru dan Agenda Pengembangan Demokrasi politik. Dalam Abuddin Nata. 2007. *Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal.15.

¹⁷Disartikulatif adalah masyarakat yang tidak mampu mengartikulasikan dirinya kedalam kekuatan politik, ekonomi hukum atau lainnya sehingga ia dapat terlibat lebih jauh bersama-sama Pemerintah, Involutif adalah masyarakat yang tidak mampu mengekspresikan ide, harapan, kehendak, tuntutan tentang demokrasi, keadilan, pemerataan, dan hak asasi manusia dalam realitas politik, ekonomi, hukum, atau lainnya. Masyarakat tersebut hanya berputar-putar pada tingkat retorika dan kata-kata belaka. Lihat Abuddin Nata. *Ibid* h. 15-16.

¹⁸Ahmad Zaeni Abar. 1995. *Kisah-kisah Pers Indonesia, 1966-1974* Yogyakarta : LKiS. h. 220.

¹⁹Hubungan yang bersifat konspiratif adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi karenakan adanya kepentingan dan keprihatinan bersama tentang berbagai krisis. Hubungan yang bersifat kooptatif adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi karena berbagai penertiban unsure-unsur masyarakat oleh pemerintah. Penertiban dilakukan dalam dua cara: Pertama, dengan cara melakukan intervensi. Kedua, dengan cara menciptakan wadah baru untuk menggantikan wadah-wadah lama yang sudah ada ataupun untuk mewadahi unsure-unsur masyarakat yang belum punya wadah. Hal ini dapat dilihat dengan penertiban partai politik, pers, aktivitas kemahasiswaan, dan organisasi lainnya. Hubungan yang bersifat dominatif adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi bilamana pemerintah melakukan penertiban secara paksa terhadap sekelompok atau unsur masyarakat yang berbeda dengan kebijakannya, baik dalam hal pemikiran, perencanaan, implementasi, maupun tujuan pembangunan. Hal ini terjadi karena Pemerintah Orde Baru dipimpin dan didukung oleh militer yang menjadi salah satu dari tiga pilar pemerintah disamping Golkar dan Birokrasi. Lihat Syafii M Anwar. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, sebuah kajian politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina. h. 75-81. Lihat pula Ignas Kleden. *Politik Teknokrasi Dalam Prisma No 3 Tahun 1983*.

²⁰Susetyo. *Politik Pendidikan Penguasa*. (Yogyakarta: Lkis. 2005). h. 2.

²¹Muh Yamin. *Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media. Cetakan 1 Januari 2009) h. 108.

²²Muh. Yamin. *Ibid*. h. 112.

²³<http://id.wikipedia.org/wiki/perguruan-tinggi-Islam-negeri-di-Indonesia>.

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

³²H.A.R. Tilaar. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

³³Lihat, H.A.R. Tilaar. 2000. *Ibid*.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.scribd.com/doc/2911005/pendikan-pasca-kemerdekaan>.

<http://www.gp-ansor.org/resensi-buku/mewujudkan-pendidikan-islam-yang-maju-html>.

Muhaemin. 2004. *Pendidikan Wcama Pengembangan Islam*. Surabaya: Pustaka Pelajar.

Chalidjah Hasan. 1995. *Kajian Pendidikan Perbandingan*. Surabaya: Al-Ikhlash

Jusuf Amir Feisal. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Abuddin Nata. 2007. *Manajmen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan pendidikan Islam Di Indonesi*. Jakarta: Kencana.

H.A.R. Tilaar. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

<http://pendis.depag.go.id/madrasah/insidex.php?i-367=bd0103>.

Ahmad Zaini Abar. 1995. *Kisah-Kisah Para Indonesia. 1966-1974*. Yogyakarta: LkiS

Syafii M Anwar. 1995. *Pemikiran Dan Aksi Islam Di Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.

Ignes Kleden. *Politik Teknokrasi. Dalam prisma. No 3 Tahun 1983*.

<http://id.wikipedia.org/wiki/perguruan-tinggi-Islam-Negeri-di-indonesia>

Susetyo, Benny Romo. 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: Lkis.

Muh Yamin. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media